

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PESETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
INTISARI.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Tentang Diskresi.....	25
1. Pengertian Diskresi.....	25
2. Jenis dan Bentuk Diskresi	26
3. Ruang Lingkup dan Batasan Diskresi.....	29
B. Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Wewenang	32
1. Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara	32
2. Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	40

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	40
B. Bahan Penelitian	42
C. Cara dan Alat Memperoleh Data	45
D. Analisis Data.....	46
E. Jalannya Penelitian	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. <i>Ratio Legis</i> Perubahan Syarat Diskresi Pasca Undang-Undang Cipta Kerja	51
1. Sumber Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dalam Melakukan Tindakan Diskresi.....	51
2. Dasar Pemikiran Dihapuskannya Syarat Diskresi Tidak Boleh Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Pada Undang-Undang Cipta Kerja.....	59
B. Implikasi Perubahan Syarat Diskresi Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	72
1. Batasan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	72
2. Implikasi Yuridis Perubahan Syarat Diskresi Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ...	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118
INDEKS ISTILAH	126
INDEKS SUBJEK.....	128
GLOSARIUM.....	130